

PESANTREN MENJADI MOTOR WIRAUSAHA



Fathuri SR

Peneliti Lembaga Pengkajian Islam dan Budaya,
Alumnus PP Salafiyah Syafiiyah al-Khoiriyah, Seblak Jombang

“*Berbicara mengenai semangat wirausaha di pesantren tidak lepas dari karakter utama pesantren yang bergerak maju seiring perubahan masyarakat. Hal ini yang tidak dilihat oleh para kritikus pesantren yang malah menyebut pesantren sebagai sarang kejumudan dan konservatisme. Padahal bicara pesantren adalah bicara tentang masyarakat. Ia menjadi miniatur masyarakat yang terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.*”

Menyandingkan antara spirit kewirausahaan dengan pesantren adalah hal yang tak terbayangkan sebelumnya, yang sangat jarang disinggung oleh banyak ahli. Sama halnya bisa melihat pesantren bertahan hingga sekarang, juga merupakan keajaiban tersendiri, mengingat lembaga pendidikan tradisional Islam serupa yang sudah gulung tikar, baik di Indonesia maupun belahan negara Islam lainnya.

Oleh karena itu membahas wujud pesantren hari ini tidak bisa lepas dari gambaran pesantren yang diberikan oleh banyak pemerhati sejak pesantren dibincangkan di ruang publik.

Gudang yang udaranya apek, itulah salah satu sebutan bagi pesantren. Meski penghuninya shalat lima kali satu hari, ia berada di dalam tempat yang pintunya tertutup, jendelanya tertutup. Tidak keluar dari zonanya sendiri. Tidak tahu menahu

dunia luar, seperti katak dalam tempurung. Tidak gaul, bahasa anak sekarang. Hanya pandai mengkaji kitab-kitab Islam saja, cuma tahu Arab Saudi dengan Makkah dan Madinahnya belaka, tidak lebih.

Pokoknya, hidup di pesantren seperti hidup di gudang yang apek. Itulah pendapat Soekarno, Presiden RI pertama Indonesia, 49 tahun yang silam, 2 Desember 1964, tentang pesantren. Ini menjadi bagian pidato tanpa teks Bung Karno “Temukan Kembali Api Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saat dianugerahi gelar Guru Besar Kehormatan dan Pendidik Agung. Bukan forum yang biasa, sebab pernyataan itu disampaikan di depan calon-calon sarjana IAIN, yang kita tahu, dari dulu sebagian besar mereka merupakan lulusan pesantren, dan Bung Karno pun mengetahuinya.

“Kalau saya boleh memakai perkataan, tetapi jangan marah lho, ini sekedar memberi pengertian, memberi ilustrasi. Kalau saya nanti mengucapkan sesuatu perkataan, jangan dianggap sebagai penghinaan, tidak. Sekedar agar supaya saudara mahasiswa-mahasiswi dari IAIN, janganlah saudara-saudara yang mempelajari Islam dan ingin membawa Islam ke taraf yang tinggi itu, sekedar dengan jiwa –maaf ya- jiwa pesantren. Saudara mengerti perkataan saya itu? Jangan sekedar jiwa pesantren.

Ya, kalau saudara sudah pandai membaca, sudah menjalankan kewajiban sehari-hari, lantas Saudara bisa berkata, sebabnya Islam surut itu ialah ini, sebabnya Islam naik dulu ialah ini. Tidak saudara-saudara. Saudara harus melepaskan diri saudara daripada sekali lagi saya minta maaf lho, bukan untuk menghina ini- jiwa

yang tadi saya namakan jiwa pesantren. Lepaskan jiwa saudara daripada yang demikian itu, tetapi naiklah ke angkasa yang setinggi-tingginya, laksana burung elang rajawali. Lihat seluruh dunia, lepaskan saudara punya jiwa, juga daripada pengertian pesantren itu.

Naik ke angkasa seperti saya ini, melihat keluar. Bukan saja melihat Saudi Arabia, ke Makkah dan Madinah. Lihat Kairo, lihat Spanyol, lihat ke seluruh dunia. Lihat ke sejarah, lihat kepada jaman dahulu, sejarah daripada bangsa-bangsa, bukan bangsa Indonesia dan Arab saja di dalam—maaf, keempat kalinya saya minta maaf—alam pesantren, dan kita tidak mau mind kita keluar. Apalagi mind kita naik ke angkasa. Kita seperti hidup dalam satu gudang, yang pintu jendelanya semuanya tertutup. Saudara-saudara kita hidup di dalam gudang itu. Ya kita di situ kita baca kitab-kitab Islam, bahkan kita sembahyang lima kali satu hari di dalam gudang yang pintunya tertutup, jendelanya tertutup. Lama-lama udara dalam gudang itu apek saudara-saudara...”¹

¹A. Aziz Masyhuri, *Karya Intelektual Ra'is Akbar dan Ra'is A'am Al-Marhumun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Bintang, 2012), h. 345. Di bagian lain, uniknya Aziz Masyhuri menceritakan kedekatan Bung Karno dengan KH Wahab Hasbullah. Dikisahkan waktu itu Soekarno bertanya kepada Kiai Wahab bagaimana memperlakukan Belanda yang masih bercokol di Irian Barat usai penyerahan wilayah seluruh Indonesia pada tahun 1949. Berbagai upaya perundingan telah dilakukan dari tahun 1950 hingga 1956.

Dalam kondisi itu Soekarno menghubungi Kiai Wahab di Jombang Jawa Timur. Ia menanyakan bagaimana hukumnya orang-orang Belanda yang masih bertahan di Irian Barat. Kiai Wahab menjawab tegas, “Hukumnya sama dengan orang yang *ghasab*.”

“Apa artinya *ghasab*, Kiai?” tanya Bung Karno.

Vonis Bung Karno terhadap pesantren sangat jelas. Jiwa pesantren tidak akan bisa membawa Islam ke taraf yang tinggi, mengelana ke penjuru dunia, mencapai peradaban yang gilang gemilang. Janganlah saudara-saudara yang mempelajari Islam dan ingin membawa Islam ke taraf yang tinggi itu, sekedar

“*Ghasab itu istihqaqu mali al-ghair big-hairi idznihi*. Artinya menguasai hak milik orang lain tanpa izin,” terang Kiai Wahab.

“Lalu bagaimana solusi untuk menghadapi orang yang *ghasab*?”

“Adakan perundingan,” tegas Kiai Wahab.

Lalu Bung Karno bertanya lagi, “Menurut insting Kiai, apakah jika diadakan perundingan damai akan berhasil?”

“Tidak.”

“Lalu kenapa kita tidak potong kompas saja, Kiai?” Bung Karno sedikit memancing.

“Tak boleh potong kompas dalam syariah,” kata Kiai Wahab. Selanjutnya Bung Karno mengutus Subandrio mengadakan perundingan yang terakhir kali dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik Irian Barat. Perundingan ini akhirnya gagal. Kegagalan ini disampaikan Bung Karno pada Kiai Wahab. “Kiai, apa solusi selanjutnya menyelesaikan masalah Irian Barat?”

“*Akhodhahu Qohro* (Ambil/kuasai dengan paksa!)” Kiai Wahab menjawab.

“Apa rujukan Kiai untuk memutuskan masalah ini?”

“Saya mengambil literatur Kitab *Fath al-Qarib* dan *syarahnya* (Al-Baijuri).”

Setelah itu, barulah Bung Karno membentuk barisan Trikora (Tiga Komando Rakyat) dalam upaya merebut kembali Irian Barat, yang akhirnya berhasil diambil pada tahun 1963.

Luar biasa. *Ghasab*, di kalangan santri adalah kata yang sangat familier. Sebab santri lain meng-*ghasab* sandalnya atau bajunya itu sering terjadi. Namun saat dikomunikasikan dengan “orang luar” dari dunia politik, konsep *ghasab* menjadi jawaban bagi perebutan wilayah antar dua negara. Dan rujukannya hanya kitab *Fath al-Qarib*, kitab fikih yang belum termasuk kitab kelas tinggi, malah tergolong kelas dasar.

dengan jiwa pesantren. Karena -sekali lagi- hidup di pesantren sama dengan hidup di gudang yang apek, yang sulit mendapat pencerahan layaknya bangsa Eropa karena tidak memiliki cara berpikir yang bebas.

Pandangan Soekarno tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Takdir Alisyahbana, 29 tahun sebelumnya. Sutan Takdir menulis kritik tajam atas promosi (propaganda dalam bahasa Sutan Takdir) terhadap pesantren yang dilakukan oleh tokoh lain: Dr Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, dan Sutopo Adiseputro. Perdebatan panjang tentang pesantren antar Sutan Takdir dengan pemikir lain ini berlangsung dari Oktober 1935 hingga April 1936 dimuat di majalah Pujangga Baru, Suara Umum, Pewarta Deli, dan Wasita. Tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan oleh Achdiat K. Mihardja dalam sebuah buku dengan judul Polemik Kebudayaan.²

Saya hanya dapat setuju dengan sistem pesantren seperti dipropagandakan itu apabila maksudnya teristimewa dengan jalan semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya membasmi buta huruf dan membawa pengetahuan ke desa. Sebabnya oleh kepandaian membaca dan menulis dan pengetahuan modern, akan terbukalah mata orang di desa. Terbuka mata berarti rubuhnya traditie yang lama,

²Ahmad Baso cukup panjang lebar mengulas polemik ini dalam bukunya, *Pesantren Studies*. (Jakarta: Pustaka Afid, 2012, Juz 2a). Meski secara kuantitatif ulasan Baso terasa kurang “adil” sebab lebih utuh mengutip para pembela pesantren dibanding yang mengkritiknya. Dalam lembar yang lebih sedikit M. Dawam Rahardjo juga membincang polemik tentang pesantren ini dalam pengantarnya di buku *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985).

rubuhnya pujaan kepada kiai, hidupnya individu manusia seorang-orang, tetapi terpecahnya persatuan yang statis, yang passief, lenyapnya konservatisme,” tulis Sutan Takdir³.

Pesantren adalah dunia yang statis, pasif, dan konservatif, yang jika mengikuti ilustrasi Bung Karno, sama dengan -sekali lagi- gudang yang apek. Karena itu menurut Sutan Takdir, “Sistem pesantren itu banyak bahayanya daripada faedahnya.” Jika kembali ke pesantren, baginya berarti kembali kepada “anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, anti-materialistik⁴.

Dianggap Gudang Sebab Tak Tahu Letak Pintunya

Namun apapun pendapat dan kritiknya, “orang luar” membicarakan pesantren adalah suatu nilai lebih. Ini menunjukkan bahwa pesantren memang eksis dan memberi dampak meski orang-orangnya diam tak banyak bicara. Sebab sejak terjadinya Polemik Kebudayaan pada tahun 1935, sejak itu pesantren tenggelam hilang dari radar, tak diperbincangkan, tak terlintas eksistensinya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Baru pada sekitar tahun 60-an hingga 70-an pesantren mulai dibicarakan kembali, tetapi lebih sering dipandang sebagai sarang kejumudan dan keterbelakangan.

Waktu itu tidak banyak orang pesantren bicara. Lebih banyak diam, karena di antara alasannya, mereka tidak ingin menonjolkan diri. Sebab agama mengajarkan mereka untuk bersikap tawadlu’, rendah hati yang sebenar-benarnya. Namun bukan berarti suara

mereka tak terdengar. Mereka tidak hadir secara langsung –baik dalam perdebatan, maupun dalam momen-momen kultural lainnya. Tetapi ia hadir melalui apa yang disebut Ahmad Baso dengan “*proxy*”, melalui perwakilan, atau *mustami*’-nya.⁵

Tetapi apapun istilahnya: wakil, *proxy*, atau *mustami*’, tetaplah “orang luar” yang belum tahu jeroan pesantren. Tentu tidak mubazir dan lebih adil bila “orang dalam” pun ikut membicarakannya. Justru ini merupakan sarana alih informasi yang diharapkan mampu memberi input objektif kepada pihak luar yang berkepentingan tertentu, dalam upaya membicarakan pesantren tersebut.⁶

Saifuddin Zuhri adalah salah satu “orang dalam” yang menyuarakan suara pesantren pada “orang luar”. 24 Juni 1974, bukunya yang ketiga “Guruku Orang-Orang Pesantren” terbit untuk memberi pengertian kepada dunia luar apa itu pesantren, yang sebelumnya sering diartikan umum secara salah. “Sebuah buku yang membangun pengertian masyarakat terhadap pondok pesantren, sebuah persemaian pendidikan Islam yang merakyat, yang sering diartikan umum secara salah bahkan disertai penilaian yang negatif. Sekaligus buku tersebut untuk menggugah kembali rasa hormat kepada guru (kiai), tokoh yang mencintai anak didik (santri) seperti anaknya sendiri, padahal tidak ada ikatan darah keturunan barang setetes pun”⁷.

Menjawab tuduhan bahwa pesantren menjadi sarang kejumudan dan keterbelakangan, atau dalam

³M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren...*, h. xii

⁴Ahmad Baso, *Pesantren Studies...*, h. 32.

⁵Ahmad Baso, *Pesantren Studies...*, h. 18
⁶KH Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 361.

⁷Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. v.

bahasa Soekarno, pesantren –sekali lagi- sebagai “gudang yang apek”, Saifuddin menuliskannya di halaman 98, “Suatu dunia yang banyak disangka orang luar sebagai “dunia tertutup”, tetapi sebenarnya adalah dunia kita yang bebas terbuka, dunia yang menanamkan keamanan batin serta kesejahteraan hidup. Orang yang menganggap dunia ini sebagai dunia tertutup hanya disebabkan karena orang tidak tahu di mana letak pintunya, dan terutama karena tidak bisa berbicara memakai “bahasa santri”.⁸

Saifuddin menyimpulkan itu dari pengalamannya saat mengikuti perjalanan salah satu kiainya, Kiai Mukhtar, yang selalu sibuk bertemu dengan orang-orang, terutama para kiai. Berbagai masalah didiskusikan, dari masalah perbaikan pesantren, masalah di mana bisa dibeli kitab-kitab bacaan para santri, masalah dakwah, dan masalah menghadapi sikap pemerintah kolonial.

Pesantren Adalah Wajah Masyarakat

Anggapan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tertutup sebenarnya bertahan hingga awal tahun 70-an. Seiring waktu imej itu mulai luntur. Pilihan sikap para kiai terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk sama sekali tidak mau bekerja sama menjadi salah satu sebab sikap “tertutup” itu. Memang tidak mudah untuk meruntuhkan imej tersebut. Akan tetapi lambat laun pasca kemerdekaan sebenarnya pesantren mulai membuka diri seluas-luasnya pada “dunia luar” dengan digalangnya banyak kerjasama antara pesantren dengan

pemerintah atau lembaga-lembaga lain.⁹

KH Sahal Mahfudh melihat bahwa hal ini tidak lepas dari filosofi lahirnya pesantren. Berdirinya pesantren adalah kehendak masyarakat. Adanya pesantren sama persis seperti filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual beli. Di mana para pembeli dan penjual tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati pasar tersebut. Namun interaksi antara penjual dan pembeli itu sendiri yang menciptakan tempat, yang disebut pasar. Gambaran seperti itulah yang semula melahirkan pesantren. Ini merupakan cerminan intensifnya dialog antara pesantren dan lingkungannya.¹⁰

Dialog ini tercipta secara alamiah, Justru tidak masuk akal, apabila pesantren tidak dapat berdialog dengan “pemilik”-nya sendiri. Tidak pernah disebut dalam sejarah bahwa pesantren adalah hasil paket dari kalangan tertentu. Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang mendukung terciptanya fenomena dialogis pesantren dengan masyarakat. Pertama, karena tempat dan kedudukannya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kedua, pendirian pesantren itu sendiri berasal dari karsa masyarakat yang memang membutuhkan kehadirannya¹¹.

Karakter dinamis yang unik seperti inilah yang tidak dipahami “orang luar” terhadap pesantren. Seperti ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier, kiai menjadi penentu utama di pesantren. Di samping itu ia dipandang pula sebagai arsitek kemasyarakatan (*social engineer*), yang

⁹Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, h. 357.

¹⁰Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, h. 362.

¹¹Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, h. 362.

⁸Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, h. 98.

harus memperhatikan “selera” masyarakat. “rahasia” ini pula yang membuat pesantren mampu bertahan disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern.¹²

Coba simak pidato Kiai Bisri Syamsuri, Rais ‘Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada santri Pondok Pesantren Tebuireng dalam sebuah acara pada 23 Juni 1978 lalu. “Anak-anakku sekalian, engkau semuanya hendaknya menyadari bahwa pertama masalah pesantren adalah masalah dunia. Kita harus mengurus perkara dunia kita seteliti dan sesegar mungkin. Jangan kamu menyerang atas dasar pandangan yang sempit. Selama ini pesantren telah menghasilkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang tinggi mutunya. Hal ini hanya bisa dicapai bilamana kita tahu persis apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat.”¹³

Ucapan Kiai Bisri ini paling tidak memberi gambaran pandangan kiai terhadap pesantren. Jelas pesantren adalah masalah dunia, yang sangat dinamis wujudnya menyesuaikan tempat dan zamannya. Ini mengingatkan kepada kita akan semboyan utama yang dipegang dan sangat terkenal di pesantren “*al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-ashlah, wa al-akhdzu min jadid an-nafi*”¹⁴ atau dengan redaksi lain *al-muhafadhah ‘ala al-qadim ash-shalih, wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, menjaga tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang

lebih baik, menjadi spirit yang dipegang dari waktu ke waktu.

Contoh konkret yang dituliskan Zamakhsyari mengenai hal ini adalah apa yang terjadi di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Pesantren ini mewajibkan semua santri mengkaji kitab-kitab *Ahlussunnah wal-Jamaah* lebih intensif. Ini mengikuti semangat *Al-Muhafadha bi al-qadim ash-shâlih*, menjaga tradisi lalu yang baik. Di luar itu semua, Pesantren Lirboyo mengembangkan sekolah SD, SMP, dan SMU yang bertaraf Internasional. *Al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* adalah spirit terobosan ini.

Langkah seperti ini kita bisa temukan di berbagai pesantren di Indonesia, tentu dengan corak dan inovasi sesuai SDM dan karakter wilayah di mana pesantren itu berada. Makanya wajar jika bentuk-bentuk pesantren yang ada saat ini bisa dikatakan sangat beragam. Tidak bisa lagi semata-mata dibagi menjadi salaf dan kholaf, tetapi perlu klasifikasi baru sehingga dapat mewakili keanekaragaman pesantren yang ada.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Abdullah Schal, pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, Bangkalan, Jawa Timur, perubahan-perubahan itu tidak seharusnya meninggalkan ciri khas pesantren sebagai tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Karena inilah yang menjadi ciri khas pesantren. Karena sebagian pesantren, mengutip pendapat Masdar F Mas’udi, sudah seperti kos-kosan saja. Ciri khas pesantren sebagai tempat ngaji bagi santri sudah hilang.

“Bukan saya tidak mengerti perkembangan pendidikan di luar pondok, tetapi untuk menerima pengaruh dari luar itu saya harus memagari terlebih dahulu

¹²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), Cet. Ke-9, h. 34.

¹³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai...*, h. 199.

¹⁴Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai...*, h. 72.

apa yang ada di dalam. Maksudnya, agar siste yang ada di dalam yang sudah dirintis Syaikhona Kholil itu tidak hilang. Sekarang ini tidak sedikit pesantren yang terpengaruh oleh perkembangan dari luar sehingga ciri-ciri kepesantrenannya pun menjadi hilang. Akhirnya pesantren pun menjadi tak ubahnya penginapan. saya menganggap baik adanya sistem madrasah dan sekolah umum saya pun dapat menerima program madrasah yang dikembangkan oleh Depag dan sekolah yang dikembangkan Diknas. Itulah mengapa santri-santri saya, selain belajar di diniyah, juga belajar di madrasah, sekolah umum, bahkan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga silahkan, tetapi harus tetap mengaji. Kenapa? Karena tujuan utama mondok di sini adalah untuk mengaji, tidak untuk sekolah. Itulah mengapa saya bersikukuh hanya akan mengembangkan madrasah diniyah di sini. Semua ini merupakan upaya untuk maju tapi sekaligus tetap menjaga jatidiri pesantren.¹⁵"

Semangat kemandirian: Cikal Bakal Wirausaha Santri

Perubahan mendasar yang terjadi di pesantren telah mengalami rangkaian perjalanan panjang, salah satunya adalah di bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan. Di bidang ini, paling tidak ada empat aktor utama yang menjadi penggerak hingga kewirausahaan menjadi perhatian utama di pesantren.

Pertama, adalah Nahdlatul Ulama (NU). Bicara tentang pesantren tidak bisa

lepas dengan NU, karena basis NU ialah pesantren. Ada dua momentum besar yang berkaitan dengan ekonomi terjadi di NU. Pertama adalah pendirian Nahdlatul Tujjar, yang menjadi embrio NU, pada tahun 1918 oleh 45 saudagar santri di tiga jalur strategis Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kediri, dan Jombang.¹⁶ Kedua, pada tahun 1938-1939, sebagai suatu gerakan keagamaan, NU membuat kegiatan yang besar artinya pada kebangunan semangat di bidang perekonomian. Gerakan itu disebut Gerakan Mabad Khairo Ummat yang mengarah semangat tolong-menolong (*muawanah*) di lapangan ekonomi bangsa, Indonesia dengan meningkatkan pendidikan moral yang bertumpu pada tiga prinsip yaitu jujur (*sidiq*), amanah (dapat dipercaya) dan tolong-menolong (*ta'awun*)¹⁷.

Dalam gerak konkretnya, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan koperasi Syirkah Mu'awwanah (1938). Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antarpesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada, dan secara khusus mengurus masalah bisnis di dalam NU. Para anggota yang memproduksi barang-barang sederhana seperti pakaian, rokok, sajadah, dan lain-lain diperkenankan memasarkan barangnya dengan nama "Nahdlatul Ulama", dengan menggunakan lambang resmi NU. Sebagai imbalannya mereka harus

¹⁵Abdul Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 150

¹⁶Khamami Zada dan Hamzah Sahal, "Modal Historis dan Ideologi Ekonomi NU," *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi No 28 2009, h. 7

¹⁷Sahal Mahfudh, "Pendahuluan", dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Stelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. xiii

mamberikan persentase keuntungannya kepada organisasi, dan semua label harus dicetak di percetakan milik NU sendiri. Kiai didorong mendirikan toko sendiri, dengan logo NU, untuk menjual barang-barang yang diperlukan di pesantren; departemen ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis mereka, dan para usahawan didorong menjual barang-barang mereka ke toko-toko ini dengan persyaratan yang lebih mudah. Namun pada kenyataannya Syirkah Mu'awwanah dan departemen yang mengurus bisnis di NU ini tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat¹⁸.

Kedua, penggeraknya adalah pemerintah. Hal ini ditandai dengan masuknya kurikulum ketrampilan di pesantren yang dibawa oleh pemerintah, khususnya pada masa Menteri Agama Mukti Ali (1973-1978). Menurutny tidak semua santri siap dan berbakat menjadi kiai, karena itu dibutuhkan bekal lain untuk santri agar mampu menghadapi persaingan di luar. "Suatu kenyataan yang kita ketahui bersama bahwa selama ini tidak semua keluaran pesantren ingin menjadi ulama atau tidak semuanya berbakat ulama. Banyak di antara alumni pondok pesantren yang memilih bekerja di luar bidang agama tanpa memiliki keahlian yang mereka peroleh selama belajar di pondok pesantren, sehingga kurikulum pendidikan keterampilan perlu diberikan di pondok pesantren. Ini berarti akan meningkatkan peranan pondok pesantren dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan di daerah pedesaan. Masuknya beberapa

komponen baru itu supaya kurikulum pondok pesantren berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia kini sedang membangun dan akan terus membangun."¹⁹

Karena itu Mukti Ali mengkritik kurikulum pesantren salaf yang sepenuhnya hanya mengajarkan pengetahuan agama. Menurutny hal itu terlampau mengedepankan kepandaian otak (menghafal) dan menonjolkan keutamaan akhlak (*tasawuf*), tetapi kurang memperhatikan aspek-aspek ketrampilan yang dapat dijadikan bekal hidup para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Seorang santri, bagi Mukti, idealnya harus mampu menyerasikan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan ketrampilan tangan (*hand*). Bahkan dengan nada optimis, Mukti mengatakan bahwa diadopsinya pendidikan ketrampilan itu akan membuat masa depan pesantren cerah dan cemerlang.²⁰

Dalam hal ini ketrampilan yang diajarkan terdiri dari: kejuruan radio elektronik, kejuruan PKK, penjahitan dan perajutan, kejuruan kerajinan dan pertukangan, kejuruan perbengkelan soldir dan mesin, kejuruan fotografi, kesenian dan olahraga, kejuruan pertanian (perikanan, peternakan, perkebunan, dan persawahan), dan kejuruan administrasi dan manajemen. "Pendidikan ketrampilan yang diberikan, dilandasi suatu pendirian bahwa tidak semua santri bakal jadi kiai. Sebagai orang biasa mereka harus memiliki ketrampilan untuk hidup di

¹⁸Khamamai Zada dan Hamzah Sahal, "Modal Historis dan Ideologi Ekonomi NU," h. 15

¹⁹A. Mukti Ali, *Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan*, (Jakarta: PT. Paryu Barkah, 1974), h. 7

²⁰Abdul Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai*, h. 52

tengah masyarakat... Beberapa jenis latihan yang diberikan antara lain menganyam, merangkai janur, pertukangan, pertanian, dan peternakan. Selain itu, pesantren juga diketahui pernah mengirimkan santri untuk mengikuti latihan-latihan penghijauan, kependudukan, kesehatan, PKK, dan lain-lain.”²¹

Pendidikan ketrampilan yang semula hanya merupakan kurikulum titipan, selanjutnya berubah menjadi program wajib bagi setiap pesantren yang ingin disetarakan dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh P3M Jakarta, pada tahun 1975 kurikulum ini baru diadopsi oleh empat pesantren di Indonesia, yaitu Pesantren Darus Salam Ciamis Jawa Barat, Pesantren Karya Pembangunan Narmada Mataram, Pesantren pabelan di Magelang, dan Pesantren Sabilul Muttaqin di Takeran Madiun. Pada tahun 1976 jumlahnya meningkat menjadi 42 pesantren, dan setahun kemudian mencapai 92 pesantren. Jumlah tersebut terus bertambah dan pada tahun 1987 mencapai 500 pesantren, sehingga untuk saat ini sudah di atas 1000 pesantren²².

Ketiga, penggeraknya adalah lembaga swadaya masyarakat. Di antara lembaga swadaya masyarakat yang paling getol menyuntikkan kemajuan di pesantren adalah P3M, singkatan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 18 Mei 1983 lembaga ini berdiri yang dimaksudkan sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar pondok pesantren untuk pengembangan pesantren

dan masyarakat. Ada banyak program yang telah ditelorkan. Khusus di bidang ekonomi, P3M mendirikan Unit Pelayanan (UP) Pengembangan Wiraswasta dan Manajemen di Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta dan UP Pengembangan teknologi Pertanian dan Agrobisnis di Pesantren Darul Falah Bogor²³.

Keempat, penggeraknya adalah pemangku pesantren itu sendiri, khususnya kiai. Selain dipengaruhi oleh pihak luar, baik oleh organisasi seperti NU, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat, situasi dan kondisi masyarakat memberi dorongan kiai untuk melakukan terobosan-terobosan baru di pesantren. Kreatifitas dan kejelian kiai dibuktikan di sini.

Misalnya, sebelum ada titipan kurikulum ketrampilan dari pemerintah, dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pesantren banyak inovasi dalam bidang pendidikan ketrampilan, khususnya dalam bidang pertanian, yang tentu saja diharapkan bisa menjadi bekal bagi para santri, selain untuk menunjang ekonomi pesantren itu sendiri. Karena itu banyak pesantren di pedesaan, seperti Tebuireng dan Rejoso, mengarahkan santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational atau ketrampilan dalam bidang pertanian, seperti penanaman padi, kelapa, tembakau, kopi dan lain-lain. Hasil penjualan dari usaha pertanian seperti itu selanjutnya digunakan untuk membiayai pesantren. Pada waktu yang berbarengan, pesantren-pesantren lain seperti Gontor, Denanyar, Tambakberas, Tegalrejo, dan tak

²¹Nasihin Hasan, *Direktori Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985), h. 236.

²²Abdul Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai*, h. 52-52.

²³Abdul Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai*, h. 56-57.

ketinggalan Tebuireng, serta yang lainnya mulai mendirikan dan mengembangkan koperasi. Melalui koperasi ini, minat kewirausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha ekonomi bila sang santri kembali ke masyarakat²⁴.

Seiring berjalannya waktu, program-program atau kegiatan-kegiatan pesantren yang mengarah pada membangun kewirausahaan santri terus menerus mendapat respon positif dari berbagai pesantren. Tengok saja Pondok Pesantren Annuqoyyah, Guluk-Guluk, Sumenep Jawa Timur. Di sana santri diberi berbagai macam keterampilan, di antaranya menjahit, fotografi, dan komputer. Kemampuan ini diberikan melengkapi kemampuan lain misalnya seni drama, seni beladiri, dan tentu saja program khusus bahasa Arab dan Inggris. Selain itu ada pula pesantren yang memberi ketrampilan pertukangan, di antaranya Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Rembang Jawa Tengah, atau perkoperasian, pengukiran, perbengkelan, dan pengelasan di Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora Jawa Tengah, atau jurnalistik seperti Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kotagede Yogyakarta dengan menerbitkan majalah Tilawah dan Mading Assibaq, atau perikanan, peternakan, dan pertanian di Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya Jawa Barat.²⁵

Kini, di antara pesantren yang pesat dalam membangun kewirausahaan santri adalah Pesantren Sunan Drajat di

Lamongan Jawa Timur. Pesantren ini memberdayakan sekitar 200 dari 9000 santri melalui pendirian sebanyak 20 unit usaha, antara lain pengolahan garam, pertambangan dan penyewaan alat berat, toserba, station radio, pengolahan air minum, pembuatan biodiesel melalui buah kemiri, peternakan sapi dan kerbau, serta unit-unit usaha lainnya. Yang menarik, pesantren yang berdiri sejak tahun 1977 tersebut sukses mengolah air laut menjadi air minum siap konsumsi, baik dalam bentuk kemasan gelas, botol, maupun galon dengan merek dagang 'Aidrat'. Pesantren yang memiliki perkebunan kemiri ini, juga kini telah berhasil membuat biodiesel dari buah kemiri²⁶. Produk-produk usaha yang telah dihasilkan oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat antara lain: perkebunan dan jus mengkudu, industri minyak kayu putih cap "Cobra", minuman (vitamin) penggemukan sapi, dan pupuk alam.²⁷

Di luar empat komponen penggerak itu, sebenarnya sistem pondok, yang membuat seorang santri harus tinggal jauh dari orang tua, menjadi media pembelajaran kemandirian bagi santri sejak dini. Kegiatan untuk mencuci baju sendiri menjadi kegiatan rutin bagi santri. Tak ada perbedaan, santri junior maupun senior, semua mencuci bajunya pribadi. Dulu, terutama di pesantren-pesantren salaf, yang mengkhususkan kajian agama, memasak juga menjadi kegiatan setiap hari, di luar ngaji.

Kegiatan mencuci ini biasanya dilakukan pada hari libur (Jumat atau Minggu). Meski demikian, sebenarnya

²⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Ciputat: 2000), h. 102-103.

²⁵PP Lakpesdam NU, *Majalah Pesantren*, Edisi I-XII/Th 1/2002.

²⁶<http://www.jurnas.com/news/94575>.

²⁷Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren," dalam A. Halim, et. al. (ed), *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 241.

waktu melakukan kegiatan-kegiatan itu bagi santri tak tentu, sesuai luang waktu dan mood-nya. Ditambah memang penjadwalan kegiatan di pesantren berpatokan dengan dasar shalat lima waktu. Tak heran, jika ditemui para santri yang mencuci atau menanak nasi di tengah malam buta atau menjelang terbenamnya matahari. Sesuatu yang mungkin tak umum di masyarakat awam sekarang.

Selain mandiri dalam mengatur jadwal kegiatan harian, yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur keuangan pribadi. Uang yang setiap bulan dikirim orang tua menjadi tanggung jawab santri membagi-baginya untuk pembayaran sekolah, pondok, jajan, membeli kitab dan buku, atau yang lainnya. Bagi santri yang manajemen keuangannya bagus bisa dipastikan tidak bermasalah, tetapi tak jarang pula santri yang amburadul mengatur keuangannya sehingga harus menemui masalah dan dipanggil oleh pengurus pondok atau pimpinan sekolah.

Karena kelebihan sistem pondok saat ini banyak ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan lain melihat manfaatnya yang luar biasa bagi perkembangan anak. Bahkan, jika menilik sejarah para ulama besar, tidak sedikit pesantren yang tidak serta merta memberi pelajaran saat santri datang. Tetapi santri terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu digembleng dengan hanya bertugas mengangkut air untuk kebutuhan pesantren, atau menjadi juru masak bagi santri-santri lainnya. Ini sebagai ajang latihan santri untuk menumbuhkan kesabaran, *riyadlah*, dan pengabdian pada dirinya.

Dengan gemblengan manajemen diri seperti ini dilengkapi dengan pelatihan berbagai kemampuan vocational tak heran

jika kemudian ghirrah kewirausahaan muncul dan berkembang pesat di pesantren. Santri yang kemudian menjadi pengusaha, wiraswasta, dan lain sebagainya semakin menemukan momentumnya.

Keberadaan pesantren yang tumbuh sesuai dengan gerak hidup masyarakat menjadi kunci pesantren dari dulu hingga sekarang tetap menjadi primadona. Jika dikatakan sebagai “gudang yang apek”, sebagai sarang kejumudan dan keterbelakangan, dan tertutup, tentu pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan tradisional satu-satunya yang bertahan sampai saat ini dengan berbagai metamorfosa yang dialaminya. Ia akan bernasib sama seperti kuttab di Mesir dan Medresse di Turki yang hilang lenyap tergusur sistem pendidikan baru. Bidang kewirausahaan yang saat ini menjadi perhatian utama masyarakat, langsung dijawab tuntas dengan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan pesantren.

Oleh karenanya di penghujung tulisan ini pantas rasanya goresan pena Saifuddin Zuhri dalam bukunya *Guruku Orang-orang Pesantren* menjadi penutupnya. “Tak ada ruginya belajar di pesantren. Kalau kelak ia jadi tukang sayur, biarlah jadi kiainya tukang sayur. Kalau kelak ia jadi sopir, biarlah ia jadi kiainya sopir-sopir. Jika kelas ia jadi direktur atau jenderal sekalipun, ia toh akan menyesuaikan dirinya sebagai kiainya para direktur dan kiainya jenderal-jenderal”²⁸ []

²⁸Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, h. 86.